

Perlu Ditinjau Ulang Program Pengentasan Kemiskinan

SLEMEN (KR) - Perlu ada peninjauan ulang bagi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan yang sudah dilaksanakan. Mengingat program tersebut menghasilkan penurunan kemiskinan yang lambat, sehingga kemiskinan di Indonesia masih menjadi persoalan bangsa. Bahkan, program penanggulangan kemiskinan menghasilkan *outcome* yang berbeda-beda di kabupaten/kota. Hal tersebut dikemukakan Saryana SIP MSi ketika mempertahankan disertasinya yang berjudul 'Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia' di Program Pascasarjana FBE UII, Senin (18/1). Saryana dengan promotor Prof Dr Jaka Sriyana, co promotor I dan II Abdul Hakim PhD dan Akhsyim Afandi PhD mempertahankan disertasi dengan penguji Dr Sahabudin Sidiq, Dr Rudy Badrudin dan Dr Nano Prawoto. Mengutip Delgado, Saryana menyebutkan, seperti halnya Brasil dan Amerika Latin. Mereka memberikan bantuan transfer tunai (CCT) yang diarahkan untuk layanan kesehatan dan layanan pendidikan kurang efektif, sehingga tidak diperpanjang. "Pemerintah perlu melakukan evaluasi, veri-

fikasi dan validasi data kemiskinan. Supaya data kemiskinan reliabel dan valid, sehingga diketahui dampak program penanggulangan kemiskinan tahun berikutnya, dan agar program tidak salah sasaran," ujarnya. Dalam kesimpulan Saryana menyebutkan, bila kebijakan asimetris lebih tepat diterapkan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Kebijakan ini dengan menetapkan program yang berbeda antara Kabupaten/Kota yang satu dengan Kabupaten/Kota lainnya berdasarkan permasalahan masing-masing. "Keberagaman dengan keseragaman kebijakan terbukti belum menghasilkan hasil maksimal," ujarnya, seraya menyebutkan, kebijakan sebagai tindakan *positive discrimination* ini disebut, untuk mencapai keadilan dan kesetaraan. Disebutkan promovendus, penerapan kebijakan asimetris dapat dilakukan. Mengutip Minas R, disebutkan resentralisasi seperti di Norwegia dan Swedia dengan melakukan pemindahan keuangan dan kewenangan penanganan kemiskinan didelegasikan kepada pemerintah Kabupaten dan Kota. (Fsy)-d

TERDAMPAK GEMPA DAPAT KERINGANAN UNM Bebaskan UKT Mahasiswa Sulbar

MAKASSAR (KR) - Universitas Negeri Makassar (UNM) Sulawesi Selatan mengambil kebijakan membebaskan uang kuliah tunggal (UKT) bagi mahasiswa terdampak gempa di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar). Rektor UNM Prof Husain Syam di Makassar, Minggu (17/1) mengatakan, kebijakan ini berlaku bagi mahasiswa Sulbar mulai jenjang pendidikan S1 hingga S3. "Untuk mahasiswa kita yang ada di Sulbar mulai S1 hingga S3 sekitar 870 orang. Mereka terpusat di Majene dan Mamuju yang masing-masing sekitar 400-an mahasiswa," katanya. Untuk mendapatkan pembebasan UKT semester genap 2020/2021, kata dia, mahasiswa harus mengikuti mekanisme pengajuan pembebasan UKT Korban Bencana Alam Provinsi Sulawesi Barat, yakni dengan cara orang tua atau wali mengajukan surat permohonan pembebasan UKT dengan melampirkan beberapa dokumen. Di antaranya fotocopy bukti pembayaran

UKT sebelumnya, fotocopy kartu keluarga dan KTP, surat keterangan terdampak bencana dari lurah/desa, foto lokasi kejadian, dan foto keluarga dan atau foto rumah. "Jadi pembebasan UKT ini hanya berlaku bagi yang terdampak. Intinya kita berpedoman kepada bukti dan keterangan resmi dari kepala desa," katanya. "Jika rumah dan keluarga tidak mengalami apa-apa, itu tidak termasuk. Namun kami sudah berkomitmen membantu seluruh mahasiswa terdampak," tambahnya. Kebijakan pembebasan UKT mahasiswa terdampak gempa Sulbar itu tertuang dalam Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar Nomor 118/UN36/HK/2021. Adapun isinya tentang pemberian bantuan bagi mahasiswa Universitas Negeri Makassar Korban Bencana alam Sulawesi Barat berupa pembebasan uang kuliah tunggal (UKT) pada semester genap TA 2020/2021, demikian Husain Syam. (Ant)-d

DORONG HILIRISASI HASIL RISET

Perlu Peningkatan Anggaran Litbang

JAKARTA (KR) - Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Inovasi dan Riset Nasional Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro menyakan keinginannya untuk meningkatkan anggaran dan kualitas belanja penelitian dan pengembangan (litbang) guna mendorong hilirisasi hasil riset. "Sasaran pokok yang kita kejar adalah tercipta ekosistem inovasi yang bisa mendorong hilirisasi hasil riset yang jadi harapan kita semua," kata Bambang dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR yang diikuti melalui siaran langsung akun Youtube Komisi VII DPR RI Channel di Jakarta, Senin (18/1). Bambang mengatakan, peningkatan anggaran dan kualitas belanja penelitian



KR-Antara
Bambang Brodjonegoro

berfokus pada peningkatan akselerasi ekosistem riset dan inovasi serta peningkatan jumlah dan kualitas belanja penelitian dan pengembangan," ujarnya. Untuk mewujudkan ekosistem riset dan inovasi, Bambang menilai, pendekatan tripelheliks menjadi kunci, yaitu pemerintah,

peneliti atau akademisi serta dunia usaha. Menurut Bambang, tugas pemerintah adalah menjadi fasilitator yang berusaha mendekatkan para peneliti dan hasil penelitiannya dengan dunia industri. "Harapan kita semua, hilirisasi hasil riset bisa terjadi," ujarnya. Prioritas riset dan inovasi yang akan didorong adalah yang bisa langsung bermanfaat bagi masyarakat dengan fokus pada inovasi teknologi tepat guna, inovasi yang bisa memberikan nilai tambah pada komersialisasi sumber daya alam, serta inovasi yang mendorong substitusi impor menjadi produk lokal. (Ant)-d

PENDIDIKAN GURU PENGGERAK

Lagi, Kemendikbud Buka Pendaftaran Seleksi

JAKARTA (KR) - Kemendikbud melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan kembali membuka pendaftaran seleksi Guru Penggerak. Seleksi untuk mengikuti Pendidikan Guru Penggerak (PGP) angkatan ketiga ini dilakukan mulai 18 Januari 2021. Seleksi terbuka untuk guru jenjang TK, SD, SMP dan SMA. Selain itu, tahun ini Kemendikbud juga melakukan rekrutmen bagi Calon Pengajar Praktik untuk angkatan ketiga. Kegiatan ini terbuka untuk guru, kepala sekolah, pengawas sekolah dan praktisi pendidikan. Nantinya, para pengajar praktik mempunyai peran memfasilitasi calon guru penggerak dalam melakukan refleksi, membuat capaian perkembangan, melakukan evaluasi, memberikan umpan balik serta memfasilitasi lokakarya pada proses PGP. Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, Praptono menjelaskan, Ke-

mendikbud akan terus mencari dan menyeleksi guru-guru terbaik di seluruh tanah air. Pihaknya mencari guru-guru yang memiliki potensi dapat menggerakkan ekosistem di sekolahnya untuk berkolaborasi dengan sekolah lain. "Kami akan menyeleksi guru-guru yang mau bergerak tanpa disuruh, dan (mereka) bergerak selalu berpihak kepada murid," ujar Praptono di Jakarta, Senin (18/1). Sebanyak 56 kabupaten/kota dari 25 Provinsi yang tersebar di enam pulau besar menjadi daerah sasaran PGP angkatan ketiga. Selanjutnya, PGP angkatan 4 juga membuka seleksi mulai 1 Maret-8 Mei dengan daerah sasaran 160 kabupaten/kota yang mewakili pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Papua dan Maluku. Informasi selengkapnya bisa akses di laman Program Guru Penggerak: <https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/gurupenggerak>. Guru-guru yang lolos seleksi meng-

ikuti PGP menggunakan pendekatan *andragogi* dan *blended learning* (darling dan luring) selama sembilan bulan. Program tersebut dirancang untuk mendukung hasil belajar yang implementatif berbasis lapangan. Oleh karena itu, 70 persen kegiatan dilakukan dalam bentuk belajar di tempat kerja (*on the job learning*). Dengan demikian, guru yang menjadi peserta PGP tetap bertugas mengajar dan menggerakkan komunitas di sekolah. Selanjutnya, 20 persen kegiatan dirancang dalam bentuk kegiatan belajar bersama rekan sejawat dan 10 persen sisanya dilakukan dalam bentuk pembelajaran bersama narasumber, fasilitator dan pendamping. Selama pelaksanaan program, guru dibimbing dan didampingi instruktur, fasilitator dan pengajar praktik (pendamping). Kuota yang tersedia bagi peserta PGP angkatan ketiga yaitu sebanyak 2.800 untuk calon Guru Penggerak dan 560 untuk calon pengajar praktik. (Ati)-d

EKONOMI

EKSPORTIR MINTA PEMERINTAH SEGERA INTERVENSI

Miris, Kontainer untuk Ekspor Alami Kelangkaan

YOGYA (KR) - Para pelaku perdagangan luar negeri, khususnya eksportir terpaksa menunda dan menahan pengiriman produknya yang telah dipesan pembeli saat ini. Penundaan pengiriman barang perdagangan luar negeri tersebut disebabkan adanya permasalahan kelangkaan peti kemas atau kontainer pengangkut barang untuk ekspor.

"Kondisi perekonomian baik nasional maupun global semakin tidak menentu saat ini seiring diberlakukannya kebijakan pengendalian dan pembatasan dari pemerintah. Sebenarnya tren ekspor kerajinan dan mebel DIY mulai mengalami kenaikan sejak 2020 lalu, hanya saja kini kami menghadapi masalah besar," ujar Penasihat Asosiasi Industri Mebel & Kerajinan Indonesia (Asmindo) Komda DIY Endro Wardoyo kepada KR di Yogyakarta, Senin (18/1). Menurutnya, permasalahan besar yang dihadapi para eksportir

tetapi impornya turun sehingga kontainer yang masuk tidak sebanding dengan yang keluar. Selain itu, kapal kargo Mother Vessel pengangkut kontainer banyak digunakan untuk mengangkut produk-produk dari China yang mengunggul akibat pandemi, itu pun masih kurang," tandas Endro. Dengan permasalahan utama kelangkaan kontainer untuk ekspor tersebut, Endro menegaskan perlu adanya intervensi dari pemerintah. Jika pemerintah tidak segera turun tangan melakukan intervensi, permasalahan tersebut sulit diatasi. Namun, sayangnya pemerintah sendiri tidak mempunyai kendali terhadap sistem pelayaran internasional termasuk penyediaan peti kemas dan lain-lain sebab dikelola pihak swasta. "Jadi percuma kita meningkatkan kapasitas produksi, tetapi

barangnya tidak bisa kita ekspor atau kirim. Untuk itu, kami benar-benar berharap pemerintah ambil peran semisal mendatangkan kontainer kosong dari luar negeri karena biayanya sangat mahal. Dalam hal ini sebagai wujud terobosan keberanian untuk itu daripada menunggu ketidakpastian dan ketidakjelasan," terangnya. Eksportir sendiri telah berusaha semaksimal mungkin meningkatkan kapasitas maupun kualitas produksinya menuju normal, tetapi sangat disayangkan muncul kendala dalam hal distribusi. Problematika distribusi perdagangan luar negeri inilah yang harus segera ditemukan solusinya oleh pemerintah, agar para eksportir di tanah air maupun di DIY bisa benar-benar bangkit supaya berkontribusi terhadap pemulihan perekonomian akibat pandemi Covid-19. (Ira)-d

OPTIMALKAN LAYANAN PESAN ANTAR Pertamina Siagakan Stok Bahan Bakar

YOGYA (KR) - PT Pertamina (Persero) tetap melakukan pengamanan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) dan elpiji serta memperketat protokol kesehatan pencegahan Covid-19 di seluruh fasilitas Pertamina menyusul Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM) di DIY sejak 11 hingga 25 Januari 2021. Pertamina sekaligus menghimbau konsumen untuk menggunakan layanan pesan antar produk BBM dan elpiji Pertamina selama diberlakukannya PTKM di DIY. "Khusus di wilayah operasi kami yang meliputi Jawa Tengah dan DIY, ketahanan stok produk kami terutama BBM per hari ini adalah antara 11 hingga 16 ketahanan hari. Artinya masih sangat aman untuk kelancaran pasokan bahan bakar selama dilaksanakannya PTKM hingga 25 Januari 2021," kata Pjs. Unit Manager Communication, Relations, & CSR Pertamina Regional Jawa Bagian Tengah (JB-T) Arya Yusa Dwicandra di Yogyakarta, Senin (18/1). Dituturkan, konsumsi BBM dan elpiji khusus untuk wilayah DIY saat ini untuk BBM gasoline baik pertamax series, per-

talite dan sebagainya di angka 1.350 kiloliter (KL) perhari dan untuk gasoil seperti biosolar dan dex series berada di angka 297 KL perhari. Sementara untuk konsumsi elpiji berada di angka 456 Metric Ton (MT) perhari. "Meskipun sempat mengalami kenaikan antara 10 hingga 20 persen pada saat *long weekend* Natal dan Tahun Baru lalu, namun stoknya masih aman di sepanjang libur kemarin. Konsumsi rata-rata harian di Yogyakarta untuk BBM jenis Gasoline sebesar 1.580 KL/hari, Gasoil 360 KL/hari dan elpiji 467 MT/hari. Kami juga sudah menyelesaikan masa Satgas Natal dan Tahun baru pada 10 Januari yang lalu," ujarnya. Selain pengamanan stok, Pertamina juga kembali melakukan pengetatan protokol Covid-19, khususnya di fasilitas penyaluran BBM Pertamina. Setiap SP-BU dilakukan penyempromotan desinfektan secara rutin selama pandemi dan setiap petugas diberlakukan prosedur dan kelengkapan seperti masker, sarung tangan, face shield, dan tempat cuci tangan. (Ira)-d

Pembiayaan Korporasi Meningkat

JAKARTA (KR) - Kebutuhan pembiayaan korporasi terindikasi meningkat pada triwulan I 2021, terutama untuk mendukung aktivitas operasional. Hal ini terlihat dari Saldo Bersih Tertimbang (SBT) kebutuhan pembiayaan korporasi pada 3 bulan mendarat sebesar 17,1 persen. Peningkatan kebutuhan pembiayaan terutama terjadi pada sektor industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan. "Kebutuhan pembiayaan korporasi tersebut sebagian direncanakan menggunakan kredit bank. Namun sebagian lainnya akan dipenuhi dari dana sendiri (laba ditahan)," kata Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono di Jakarta, Senin (18/1). Dikatakan, penambahan pembiayaan yang dilakukan oleh rumah tangga pada 3 dan 6 bulan yang akan datang diindikasikan masih terbatas. Kebutuhan pembiayaan oleh rumah tangga yang masih terbatas tersebut terutama akan diajukan kepada bank umum, dengan jenis pembiayaan yang diajukan mayoritas berupa kredit multi guna (KMG). "Dari sisi penawaran perbankan, penyaluran kredit baru diperkirakan akan mulai meningkat pada awal 2021. Hal tersebut terindikasi dari SBT perkiraan penyaluran kredit baru Januari 2021 sebesar 53,1 persen yang lebih tinggi dibandingkan dengan SBT perkiraan penyaluran kredit baru Desember 2020 sebesar 42,8 persen. Berdasarkan kelompok bank peningkatan diperkirakan terjadi pada bank umum syariah dan bank umum, sementara berdasarkan jenis penggunaan peningkatan tertinggi terjadi pada KMK dan KPR," jelas Erwin. (Lmg)-d

Masih Ada Peluang Menjadi Pemenang

SELAMA WfH ini saya sering menerima keluhan yang disampaikan beberapa teman & relasi. Tentang kepedihan yang dideritanya akibat ulah suami atau anaknya. Atau karena ulah atasan atau anak buah di tempat kerjanya. Jadi....apa yang dapat kita lakukan jika kita menghadapi sikap yang tak sewajarnya dalam keluarga atau di tempat kerja? Kena fitnah atau sikap tak menyenangkan di tempat kerja? Saran saya agar tetap tegakkan kepala menatap ke depan. Tak perlu ditangisi jika kita yakin, bahwa kita memang tidak bersalah. Bahwa masih ada Allah tempat kita berharap. Kebenaran pasti menang. Masa pandemi sekarang ini sudah menimbulkan beban berat bagi kehidupan kita semua. Jadi janganlah ditambah dengan masalah yang membuat kita semakin resah. Karena hal ini bisa mengakibatkan kondisi kita semakin parah. Iya, kan? Jadi sebaiknya bagaimana? Apa yang harus kita lakukan, agar kita tidak jatuh tersungkur? Menanggapi atau "cuekin aja"? Yuk, bersikap cerdas emosi; 1. Berpikir positif, bahwa kapan saja di mana saja, masalah pasti ada. Dan kita pasti bisa mengatasinya. 2. Syukuri apa yang telah kita capai atau punya. Ini akan menguatkan kita untuk bisa "survive". 3. Akui kegagalan & kekurangan yang kita hadapi. 4. Lakukan evaluasi atas prestasi yang ada pada kita. Keberhasilan, lengahan & kekurangan kita. Tapi jangan ditangisi atau disesali. 5. Siapkan diri untuk mau berubah. 6. Hilangkan penyesalan dan dendam atas apa yang kita alami. 7. Bina jaringan. Di lingkungan keluarga dan juga teman. 8. Lupakan dendam atau kepehitan. 9. Sementara belum mendapatkan posisi, kondisi baru, tetap berolah raga untuk terjaga kondisi fisiknya. 10. Kembangkan semangat pembelajar dan pelajari internet & semua perkembangan IT. Sebagaimana pendapat HILLON I. GOWA. Bahwa pengalaman adalah guru masa lalu. Jangan hanya belajar dari pengalaman masa lalu tapi juga dari praktik. Dalam praktik kita belajar membiasakan diri, mengasah kecakapan dan perilaku, keterampilan, mengoreksi dan mengevaluasi sehingga berhasil. Ingat bahwa selalu masih ada masa depan. **MASIH ADA PELUANG MENJADI PEMENANG!**



MADDALENA SUKARTONO - LPSDM ABISATYA PARAMITRA